

## **Analisis Pengaruh Belanja Daerah, DBH dan DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah**

**Helda Rafsanjani, Suharno\***

Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia

\*Correspondence email: [suharno@unsoed.ac.id](mailto:suharno@unsoed.ac.id)

**Abstrak.** Otonomi daerah merupakan kebijakan dimana sistem pemerintahan beralih dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Peningkatan Dana Perimbangan diharapkan diikuti dengan peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan sebagai cerminan dari kemandirian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah, DBH, DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Kata kunci:** belanja daerah; dana alokasi umum; dana bagi hasil; pendapatan asli daerah

**Abstract.** Regional autonomy is a policy in which the government system shifts from a centralized system to a decentralized one. The increase in the Balancing Fund is expected to be followed by an increase in regional fiscal independence in the form of a significant increase in Local Revenue (PAD) as a reflection of regional independence. The purpose of this study was to determine the effect of Regional Expenditure, Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU) on Regional Original Revenues in Central Java Province. This research uses a quantitative approach with a regression test. The results showed that the allocation of Regional Expenditures and Revenue Sharing Funds have a positive effect on Regional Original Revenues, while the General Allocation Funds have a negative effect on Regional Original Revenues.

**Keywords:** DAU; DBH; PAD; Regional Expenditures

### **PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana sistem pemerintahan beralih dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Hubungan keuangan antar pemerintah merujuk pada hubungan keuangan berbagai tingkatan pemerintah dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan negara dan pola pengeluarannya Handayani (2019). Tujuan penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat itu adalah agar daerah-daerah dapat berpartisipasi dalam mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab dan diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Ciri dari dilaksanakannya sistem desentralisasi adalah diimplementasikannya desentralisasi fiskal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Desentralisasi fiskal sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Sesuai dengan tujuan Dana Perimbangan menurut UU Nomor 33 tahun 2004, diharapkan peningkatan Dana Perimbangan diikuti dengan peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan sebagai cerminan dari kemandirian daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Selain itu dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumber dana bagi Pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan kemakmuran masyarakat daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Wandira (2013) dalam Iqbal, *et al* (2020), pada masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja daerah pada APBD. Pengelolaan dan pengalokasian anggaran publik menempati posisi strategis dalam pembangunan suatu negara,

termasuk anggaran daerah. Dalam fungsi alokasi, anggaran publik memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan publik (Tuasikal, 2008). Besar kecilnya pendapatan menentukan kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik, serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (Mahmudi, M dan Sallama, 2010). Optimalisasi PAD akan mampu digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah, sehingga daerah lebih mandiri dan tidak tergantung dengan dana transfer pusat.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan menjalankan program-program pembangunan. Berkenaan dengan otonomi daerah, PAD juga adalah salah satu sumber pembiayaan daerah untuk membiayai kegiatan dan program daerah tersebut sesuai dengan visi misi daerah tersebut. PAD juga merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah (Amelia, Arfan and Abdullah, 2019). Untuk itu pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan daerah tetap berjalan, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap pemerintahan daerah otonom harus membiayai keseluruhan keperluan dari PAD, melainkan juga harus didukung oleh transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan. Namun prakteknya, keberadaan transfer pemerintah pusat pada APBD daerah menjadi fenomena tidak optimalnya daerah didalam menggali potensi PAD yang ada di daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah (Listiorini, 2012). Besaran penerimaan DBH suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran APBD. Besarnya realisasi DBH yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil (Susanti and Fahlevi, 2016). Menurut Halim and Mujib (2009), untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian dana bagi hasil dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur berdasarkan Permedagri.

Studi literatur dari beberapa ahli juga telah berpendapat mengenai pengaruh Belanja Daerah, DBH, DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah. Julitawati, Darwanis, and Jalaluddin (2012) dalam penelitiannya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maimunah and Akbar (2008) mengaskan DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Menurut penelitian Amelia *et al* (2019) menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan. Penelitian Syamni and Ichsan (2018); Elisabeth (2018); menemukan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2016. Sedangkan Amalia, *et al* (2015) menerangkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013.

Penelitian Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Harianto and Adi (2007) juga menegaskan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal. Demikian pula Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh periode 2011-2014, PDA, DAU, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal (Susanti and Fahlevi, 2016). Sejalan dengan penelitian Masdjojo and Sukartono (2009), Sasana (2010) dan Nurdini, *et al* (2015) yang mengemukakan bahwa DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Nirmala and Putra (2021) menemukan bahwa DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar, sedangkan DAK berpengaruh positif tidak signifikan. Penelitian terdahulu, Wulandari (2014) mengemukakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Dijelaskan dalam penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali oleh Putra and Dwirandara (2015) dipaparkan bahwa *profit sharing funds (DBH) and original local revenue (PAD) have positive and significantly effect on Local Expenditure (BD)*. Fenomena berupa tidak optimalnya daerah didalam menggali potensi PAD dikarenakan keberadaan transfer pemerintah pusat pada APBD, hampir terjadi diseluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, termasuk diantaranya Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah, DBH, DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

**METODE**

Penelitian ini melibatkan 4 variabel, yaitu 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus sampling (sampel jenuh) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menurut Sugiyono (2011), Sampel adalah bagian dari sejumlah perusahaan yang diperkirakan dapat mewakili karakteristik populasi. Sedangkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2005-2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, data-data mengenai pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series (runtut waktu) selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 meliputi data: Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Metode analisis data pada penelitian ini adalah regresi linier berganda, yakni metode analisis yang tepat ketika penelitian melibatkan satu variabel terikat yang diperkirakan berhubungan dengan satu atau lebih variabel bebas. Model analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:  $Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$

Keterangan: Y = Pendapatan Asli Daerah;  $\alpha$  = Konstanta; X1 = Belanja Daerah; X2 = Dana Bagi Hasil; X3 = Dana Alokasi Khusus;  $\beta$  = Koefisien Regresi; e = Error term

**HASIL**

**Tabel 1**  
**Hasil Regresi Linier**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1579776.799	537144.900		2.941	.013
BLJ	.525	.049	1.070	10.632	.000
DBH	1.072	1.183	.052	.907	.384
DAU	-.523	.354	-.131	-1.478	.167

Sumber: data olahan

Tabel 1 persamaan regresi Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah:  $Ln(PAD) = 1579776.799 + 0.525 (BLJ) + 1.072 (DBH) - 0.523 (DAU) + e$   
Konstanta 1,579,776.799 berarti apabila variabel independen bernilai 0, maka Pendapatan Asli Daerah bernilai 1,579,776.799. Persamaan regresi diatas artinya pada saat terjadi kenaikan angka Belanja Daerah sebesar 1 persen, maka akan menaikkan PAD sebesar 0.525 persen dan sebaliknya. Selanjutnya saat terjadi kenaikan Dana Bagi Hasil sebesar 1 persen, maka PAD akan naik sebesar 1.183 persen. Untuk setiap kenaikan DAU sebesar 1 persen, maka PAD akan turun sebesar 0,523 persen.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
BLJ	.116	8.632
DBH	.356	2.810
DAU	.150	6.657

Sumber: data olahan

Tabel 2 hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom VIF, yakni untuk variabel BLJ (8.632), DBH (2.810), dan DAU (6.657). Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada variabel bebas tersebut. Tabel 3 output data ini terlihat nilai D-W yaitu

sebesar 2,331 dan berada di luar daerah penerimaan dengan nilai antara -2 dan 2. Maka dapat disimpulkan model regresi yang digunakan terdapat gangguan autokorelasi, tetapi masih dapat ditoleransi dalam statistik. Tabel 4 *Output* data ini terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) yakni  $0,200 > 0,05$  yang berarti bahwa data terdistribusi dengan normal.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Auto Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.000 <sup>a</sup>	.000	-.273	540955.45150000	2.331

Sumber: data olahan

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**

N		15
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	479505.75790000
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.089
	Negative	-.104
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: data olahan

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	532668.953	310559.298			1.715	.114
BLJ	.001	.029	.019	.023	.982	.982
DBH	-.113	.684	-.081	-.165	.872	.872
DAU	-.056	.205	-.207	-.276	.788	.788

Sumber: data olahan

Tabel 5 Signifikansi dari masing-masing variabel bebas menunjukkan level sig.  $> \alpha$ , yaitu 0,982 untuk BLJ, sebesar 0,872 untuk DBH, dan sebesar 0,788 untuk DAU. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas dan layak untuk diteliti. Tabel 6 Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas. Nilai *prob.F (statistic)* sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh realisasi Belanja Daerah (BLJ), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	245993521000000.000	3	81997840350000.000	280.207	.000 <sup>b</sup>
Residual	3218960806000.000	11	292632800600.000		
Total	249212481900000.000	14			

Sumber: data olahan

Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 1. Nilai *prob. t* hitung variabel bebas BLJ sebesar 0,000 angka ini lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel ini dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan pengaruh variabel bebas DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, hal ini dapat dilihat dari nilai *prob. t* hitung DBH (0,384) yang lebih besar dari 0,05. Begitu juga dengan nilai *prob. t* hitung pada variabel bebas DAU sebesar 0,167 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa DAU juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Tabel 7  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.994 <sup>a</sup>	.987	.984	540955.45150

Sumber: data olahan

Nilai R-Square pada tabel di atas besarnya 0,994 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel Belanja Daerah (BLJ), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99.4 %. Sedangkan sisanya sebesar 0.6% dipengaruhi variabel lain. Hasil pengujian secara statistik yang telah dilakukan antara variabel Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menghasilkan persamaan regresi yang menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.525. Hal ini berarti bahwa belanja daerah mempunyai nilai positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti jika Belanja Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Hasil uji t menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Alokasi belanja signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan Belanja Daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa prioritas pembangunan dalam alokasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain penanggulangan kemiskinan, penguatan daya saing ekonomi daerah, pengurangan kesenjangan wilayah, perwujudan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana, dan pariwisata. Jelas terlihat dalam pengalokasian belanja daerah dalam membangun perekonomian daerah, pembangunan manusia, dan pariwisata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian secara statistik yang telah dilakukan antara variabel Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Asli Daerah menghasilkan persamaan regresi yang menghasilkan nilai koefisien sebesar 1.072. Hal ini berarti bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai nilai positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti jika Dana Bagi Hasil meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Hasil uji t menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengalokasian Dana Bagi Hasil walaupun tidak signifikan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, tetapi pada kenyataannya memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam pelaksanaan pengalokasian Dana Bagi Hasil terdapat petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Penyaluran Dana Bagi Hasil yang dialokasikan dalam lima kegiatan yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, lingkungan sosial, sosialisasi kebutuhan di bidang cukai dan pemberantasan barnag cukai illegal. Pengalokasian Dana Bagi Hasil melalui lima kegiatan tersebut juga berdampak positif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil pengujian secara statistik yang telah dilakukan antara variabel Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah menghasilkan persamaan regresi yang menghasilkan nilai koefisien sebesar -0.523. Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai nilai negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti jika Dana Alokasi Umum meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan. Hasil uji t menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, ini dikarenakan Dana Alokasi Umum lebih diperuntukan untuk belanja pegawai.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa alokasi belanja daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menandakan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan Belanja Daerah dan Belanja Daerah telah membantu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan di Provinsi Jawa Tengah alokasi Dana Alokasi Umum lebih besar untuk belanja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, W. R., Nor, W. and Nordiansyah, M. 2015, Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (K) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013), *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 1–12.
- Amelia, D., Arfan, M. and Abdullah, S. 2019, Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan Sebagai Pemediasi Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Outcomes Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 48–69. doi: 10.24815/jped.v5i1.13822.
- Elisabeth, 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Velanja Daerah Serta Analisis Flypaper Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat.

- Halim, A. and Mujib, I. 2009, *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Edisi Pert. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Handayani, A. 2019, *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Harianto, D. and Adi, P. H. 2007, Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita, *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar, 1–26.
- Iqbal, M., Abbas, T. and Ratna, 2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), doi: 10.29103/jeru.v3i3.3583.
- Julitawati, Darwanis and Jalaluddin, 2012, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 15–29.
- Listiorini, 2012, Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Utara, *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 4(2), 111–126.
- Mahmudi, M dan Sallama, N. 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Maimunah, M. and Akbar, R. 2008, Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11(1). doi: <http://doi.org/10.33312/ijar.184>.
- Masdjojo, G. N. and Sukartono, 2009, Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah serta analisis, *TEMA Telaah Manajemen*, 6(1), 32–50.
- Nirmala, P. C. and Putra, C. G. B. 2021, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar, *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 401–417.
- Nurdini, R., Wiratno, A. and Farida, Y. N. 2015, Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2(1), 80–94.
- Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23.
- Putra, D. and Dwirandara, A. A. N. B. 2015, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali, *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 811–827.
- Sasana, H. 2010, 'Flypaper effect pada dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada provinsi di indonesia, 5(2).
- Sugiyono 2011, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. 1st edn. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, S. and Fahlevi, H. 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Padakabupaten/Kota di Wilayah Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191.
- Syamni, G. and Ichsan, 2018, The Determinants of Districts/Cities Spending in Aceh Province: An Analysis of Electoral Districts, *The Journal of Social Sciences Research*, 295–298.
- Tuasikal, 2008, Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124–142.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wulandari, Y. 2014, Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia. Universitas Negeri Padang.